

# ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



## BULOG BALI ALOKASIKAN CADANGAN BERAS SAMBUT GALUNGAN KUNINGAN

PEMROV BALI  
CAIRKAN BANTUAN  
DESA ADAT YANG  
TERTUNDA DI 2023

Hal. 2



PEMKAB BADUNG  
KOMITMEN MAJUKAN  
SEKTOR PERTANIAN

Hal. 8



HAL  
12

# Pemprov Bali Cairkan Bantuan Desa Adat Yang Tertunda di 2023

**P**emerintah Provinsi Bali mulai pekan kedua Februari 2024, mencairkan hibah bantuan dana desa adat untuk tahap ketiga tahun anggaran 2023 sebesar Rp100 juta, yang sempat tertunda pembayarannya pada tahun lalu.

“Sudah ada yang cair untuk 300 desa adat,” kata Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra di Denpasar, Minggu.

Dengan mulai dicairkannya hibah uang untuk desa adat tersebut, Agung Kartika berharap hingga akhir Februari 2024, bisa dicairkan untuk 1.493 desa adat di Provinsi Bali.

“Kami berharap belanja-belanja terdahulu yang sudah dilaksanakan desa adat bisa ditutup dengan pencairan tahap ketiga ini,” ucapnya.

Yang paling penting, kata Agung Kartika, desa adat bisa memanfaatkan pencairan hibah

tahap ketiga ini untuk kegiatan pelestarian adat, tradisi, seni dan budaya Bali.

“Kita tahu bahwa pengeluaran desa adat sangat tinggi, sehingga tentu dengan pencairan ini, pelaksanaan program kegiatan adat, tradisi dan seni budaya bisa dilaksanakan,” ucapnya.

Terlebih, ujar Agung Kartika,

tika, pada Februari ini merupakan Bulan Bahasa Bali, sehingga sudah tepat waktunya desa adat mulai berkegiatan terkait pemuliaan pada bahasa, aksara dan sastra Bali.

“Kami harapkan desa adat menjadi yang terdepan, karena menjadi wadah dalam menjaga adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal,” katanya.

Agung Kartika berharap tradisi dan seni budaya Bali ini tetap lestari dan berkelanjutan. “Aksara Bali tidak saja harus dimiliki, tetapi juga digunakan di ruang publik, seperti pura, wantilan, balai banjar, pasar, desa adat, dan seba-

gainya,” katanya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali pada 2023 berencana mengucurkan hibah uang untuk 1.493 desa adat dengan nilai total mencapai Rp447,9 miliar yang dapat digunakan untuk mendukung program desa adat dan menyukseskan program pemprov setempat.

Besaran hibah yang diterima setiap desa adat sebesar Rp300 juta. Pencairan hibah dibagi menjadi tiga tahap, untuk setiap tahapan dicairkan sebesar Rp100 juta.

Tetapi, pencairan hibah desa adat tahap ketiga pada 2023 tertunda, karena penerimaan pendapatan daerah Pemprov Bali saat itu tidak maksimal, sehingga ditunda pembayarannya pada 2024. (ant)



Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra di Denpasar. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

## Pemkab/kota se-Bali Ikuti Tahapan Wawancara Ajang Paritrana Award



Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Kepala BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, Senin (19/2/2024). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

**PEMERINTAH** kabupaten/kota se-Bali mengikuti tahapan wawancara terkait ajang Paritrana Award tahun 2024 untuk mengetahui komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan pekerja penerima upah.

“Sebagai upaya untuk terus

meningkatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja kita, maka salah satu upaya yang dilakukan melalui pemberian penghargaan Paritrana Award,” kata Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Senin.

Dewa Indra sebagai salah satu tim penilai Paritrana Award

menyampaikan poin penilaian pada tahapan wawancara meliputi komitmen kepala daerah, kepala desa, dan pimpinan perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat dan para pekerja.

“Komitmen itu tidak dinilai dari ucapan saja, tetapi dinilai dari kebijakan dan regulasinya, seperti ada perda, peraturan bupati/wali kota, keputusan bupati, instruksi bupati, surat edaran, hingga perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan perusahaan-perusahaan,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Dewa Indra, juga dilihat dari inovasi yang dilakukan karena perlindungan ketenagakerjaan tidak semuanya harus ditanggung dari APBD. APBD selama ini telah menanggung untuk para pegawai, tenaga kontrak hingga pekerja rentan.

Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, pemerintah dapat mensosialisasikan dan mengedu-

kasi bahkan mengeluarkan persyaratan yang bisa mengajak perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi semua pekerjanya. “Semakin banyak inovasi yang dilakukan tentu kepesertaan semakin banyak,” ujarnya.

Kriteria penilaian juga terkait dari perkembangan kinerja kepesertaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. “Kalau tetap segitu-segitu saja artinya kebijakan tidak efektif,” kata Dewa Indra.

Sementara itu Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) Kuncoro Budi Winarno mencatat hingga Desember 2023 jumlah peserta BPJAMSOSTEK di Provinsi Bali sebanyak 1,027 juta pekerja.

“Jumlah kepesertaan tersebut naik 36 persen dibandingkan pada 2022 yang tercatat sebanyak 753 ribu peserta aktif,” ujar Kuncoro. (ant)

# Pemkot Denpasar - PHDI Gelar Lomba Trisandya Kuatkan Karakter Siswa

**P**emerintah Kota Denpasar bersinergi dengan Parisa-da Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menggelar lomba melantunkan Puja Trisandya tingkat SD dan SMP sebagai salah satu upaya penguatan karakter pelajar di daerah itu.

“Lomba ini sangat baik sebagai upaya penguatan karakter generasi muda di tengah berbagai tantangan akibat kemajuan iptek dan globalisasi,” kata Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat membuka lomba tersebut di Denpasar, Bali, Sabtu.

Jaya Negara mengapresiasi penyelenggaraan perlombaan melantunkan mantra suci Trisandya yang digagas oleh PHDI Kota Denpasar ini sebagai sebuah kegiatan yang turut memeriahkan HUT Ke-236 Kota Denpasar.

Menurut dia, jika anak-anak sudah mempunyai landasan ajaran agama Hindu yang baik, maka akan memiliki karakter yang baik dan andal.

Jaya Negara berharap lomba



tersebut dapat dilaksanakan secara rutin, karena akan semakin memacu peningkatan kemampuan anak-anak sejak dini mengenai bait-bait dan cara melantunkan Puja Trisandya dengan benar.

Sementara itu, Ketua PHDI Kota Denpasar I Made Arka mengatakan lomba yang memper-ebutkan piala bergilir Wali Kota Denpasar ini diikuti 53 grup untuk SD dan 30 grup SMP.

Setiap grup terdiri atas tiga orang yang merupakan campuran siswa laki-laki dan perempuan. Lomba ini diadakan selama dua hari, yakni 17-18 Februari 2024.

Melalui lomba ini diharapkan akan semakin membuat para remaja Hindu dapat menghayati dan melaksanakan Puja Trisandya



Perwakilan siswa di Denpasar yang sedang mengikuti lomba melantunkan Puja Trisandya di Denpasar, Sabtu (17/2/2024). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

yang baik dan benar:

“Dari segi pengucapan, sikap yang baik dan benar serta penghayatan saat melakukan Puja Trisandya harus diakui para peserta yang tampil sebagian besar sudah bagus dalam melantunkan Trisandya,” ujarnya.

Melalui lomba tersebut diharapkan generasi muda akan tetap berpegang teguh pada ajaran agama Hindu. Selain itu, siswa juga

bisa lebih mengenal Hindu secara menyeluruh dan yakin terhadap Tuhannya dan dapat melantunkan mantra Trisandya sesuai yang telah ditetapkan dalam satuan tafsir PHDI Pusat Tahun 1991.

“Kegiatan Puja Trisandya ini diharapkan dapat dilaksanakan sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan baik, bukan hanya dilaksanakan saat lomba semata,” kata Made Arka. (ant)

# 160 Ogoh-Ogoh Untuk Kesanga Festival di Denpasar Masuki Penilaian



Dewan juri saat melakukan penilaian lomba ogoh-ogoh di salah satu banjar di Kota Denpasar. ANTARA/Ni Luh Rhismawati

**SEBANYAK** 160 ogoh-ogoh karya seni dari sekaa teruna (kelompok pemuda-pemudi) di Kota Denpasar, Bali, yang akan memperebutkan posisi dalam ajang Kesanga Festival 2024, sudah masuk dalam tahap penilaian.

“Ada tiga hal yang dinilai dalam lomba ogoh-ogoh ini,” kata I Komang Indra Wirawan, salah seorang juri lomba ogoh-ogoh tersebut di Denpasar, Minggu.

Penilaian lomba ogoh-ogoh serangkaian Hari Suci Nyepi Saka 1946 dan Kesanga Festival 2024

ini dilaksanakan selama dua hari, pada 17 dan 18 Februari 2024.

Panitia dan dewan juri silih berganti mendatangi banjar-banjar (dusun) di wilayah Kota Denpasar yang ogoh-ogohnya terdaftar sebagai peserta lomba.

Bahkan untuk memastikan kekuatan konstruksi, ogoh-ogoh turut diangkat meski penilaian dilaksanakan di tempat.

Indra menyampaikan ada tiga hal yang dinilai dalam lomba ogoh-ogoh ini. Pertama, ada ide yang diangkat agar orisinal atau baru. Kedua ada kreativitas dan rancang bangun termasuk proporsional dari ogoh-ogoh itu sendiri.

Ketiga, ada pertunjukan, sehingga di akhir penilaian anggota sekaa teruna diminta mengangkat dan menggoyang-goyangkan ogoh-ogoh itu. “Hal ini sesuai dengan definisi ogoh-ogoh yakni ogah-ogah atau karya tiga dimensi yang ditarikan,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Raka Purwantara mengatakan dalam penilaian lomba ogoh-ogoh ini akan dicari sebanyak tiga ogoh-ogoh terbaik di masing-masing kecamatan.

Nantinya tiga ogoh-ogoh terbaik di tiap-tiap kecamatan akan mendapatkan uang pembinaan masing-masing Rp30 juta

“Total ada 12 ogoh-ogoh terbaik dari empat kecamatan yang akan mendapatkan uang pembinaan, dan nantinya diparadekan di kawasan Catur Muka Denpasar dalam ajang Kesanga Festival,” ucap Raka Purwantara.

Selain itu, lanjut dia, Kasanga Festival ini juga dimeriahkan dengan lomba ogoh-ogoh mini, lomba sketsa ogoh-ogoh, dan lomba baleganjur ngarap. Untuk Kasanga Festival digelar selama tiga hari pada 1-3 Maret 2024. (ant)

# Wali Kota Denpasar Temui Dirjen Migas Laporkan Kelangkaan Elpiji 3 Kg

WALI Kota Denpasar, Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara menemui Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, di Jakarta, Rabu, untuk menyikapi kelangkaan suplai elpiji 3 kilogram di daerah setempat.

Jaya Negara, dalam keterangan tertulisnya mengatakan pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai respons terhadap kelangkaan suplai elpiji 3 kilogram di wilayah Kota Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara beraudiensi ke Dirjen Migas bersama dengan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dan Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Artha.

"Kami memprioritaskan kebutuhan masyarakat Denpasar. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak terkait guna menangani masalah ini dengan cepat dan efektif," ujar Jaya Negara.

Ia menyampaikan keprihatinannya atas dampak yang ditimbulkan oleh kejadian kelangkaan elpiji ini terhadap masyarakat setempat.

Hal itu mengingat elpiji 3 kg menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama yang kelompok menengah ke bawah.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Denpasar bersama Bupati Tabanan dan Bupati Bangli berdiskusi bersama Dirjen Migas untuk mencari solusi guna memastikan pasokan elpiji kembali normal dan aman bagi konsumen.

Selain itu, turut dibahas langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang.

Sementara itu Dirjen Migas Tutuka Ariadji menanggapi serius kekhawatiran yang disampaikan oleh Wali Kota Denpasar beserta bupati lainnya itu.



Wali Kota Denpasar, Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menyerahkan cenderamata kepada Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, di Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar

Pihaknya mengaku siap untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kelangkaan pasokan elpiji 3 kilogram di wilayah Bali, khususnya Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli.

"Terkait kelangkaan pasokan elpiji 3 kg, penurunan pasokan pada 2024 memang terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota

di Indonesia, kami akan melakukan evaluasi terkait masalah ini," ujarnya lagi.

Hal tersebut untuk memastikan kelancaran pasokan elpiji 3 kg di wilayah kabupaten/kota yang terdampak di Bali dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. (ant)

# Pemkot Denpasar Serahkan Penggunaan BMD Hasil Penataan Pantai Sanur



Wali Kota Denpasar I GN Jaya Negara saat menyaksikan penyerahan penggunaan barang milik daerah (BMD) hasil penataan kawasan pesisir Pantai Sanur di Denpasar, Kamis (22/2/2024). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali, menyerahkan penggunaan barang milik daerah (BMD) hasil penataan kawasan pesisir Pantai Sanur ke Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran serta Perusahaan Umum Daerah Bukti Praja Sewakadarma.

Wali Kota Denpasar I Gusti

Ngurah Jaya Negara, di Denpasar, Kamis, berharap dengan penyerahan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir Sanur.

"Selain itu, pengelolaan dan perawatan salah satu kawasan wisata di Kota Denpasar ini dapat ditingkatkan," ujar Jaya Negara

disela-sela menyaksikan acara penyerahan penggunaan BMD tersebut.

Barang milik daerah (BMD) di pesisir Pantai Sanur yang diserahkan penggunaannya ke Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran serta Perusahaan Umum Daerah Bukti Praja Sewakadarma di antaranya berupa jalan setapak, toilet, lampu taman dan sebagainya.

"Dengan ini kami berharap dapat dilakukan penataan hingga pengelolaan oleh Desa Adat Sanur, Desa Adat Intaran dan juga Perumda Bukti Praja Sewakadarma yang tentu akan memberikan peningkatan penataan hingga manfaat kesejahteraan kepada masyarakat setempat," ujar Jaya Negara.

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Perwali No 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kawasan Pesisir Sanur, Perwali Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perumda Bhukti Praja dan Perwali No 2

Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang milik daerah yang diserahkan penggunaannya tersebut secara reguler dilakukan monitoring dan evaluasi (mon-ev) dan lima tahun sekali dapat diperpanjang.

Sementara itu Bandesa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana menyampaikan penataan Pantai Sanur yang telah dilakukan Pemkot Denpasar dapat tetap terjaga dari segi kebersihan hingga pengelolaan.

"Kami berharap penataan Pantai Sanur dapat kita jaga dengan baik, dari segi kebersihan hingga kenyamanan bagi wisatawan dan juga pengunjung," ujarnya.

Selain itu, Pantai Sanur tidak saja dinikmati oleh wisatawan, namun juga dimanfaatkan masyarakat di Kota Denpasar sebagai kegiatan upacara agama. (ant)

# Pemkab Badung Bangun Rumah Dinas Untuk Pejabat Kejati Bali

**P**emerintah Kabupaten Badung, Bali membangun rumah dinas bagi pegawai eselon III Kejaksaan Tinggi Bali.

“Pembangunan sarana dan prasarana Kejaksaan Tinggi Bali berupa rumah dinas eselon III merupakan wujud apresiasi dan penghargaan kami kepada Kejaksaan Tinggi Bali atas sinergi dan kerja sama yang sangat baik selama ini,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat upacara Melaspas bangunan tersebut di kawasan Sanur, Kota Denpasar, Senin.

Ia mengatakan, selain sebagai penegak hukum kejaksaan memiliki tanggung jawab dalam membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya dengan mendampingi pemerintah daerah untuk memberikan masukan guna mempermudah investasi di daerah.

“Kejaksaan Tinggi Bali selaku

bagian dari Forkopimda telah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami di Badung dalam membangun keamanan, menumbuhkan perekonomian, penegakan hukum, serta mempermudah dan menarik investasi di daerah,” kata dia.

Bupati Giri Prasta menjelaskan sinergi yang telah terjalin antara Pemkab Badung dengan jajaran kejaksaan serta institusi terkait lainnya, selama ini dinilai telah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Terlebih Badung telah menjadi destinasi pariwisata internasional, tentu berpotensi muncul berbagai permasalahan hukum dalam berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya maupun menyangkut pertanahan dan



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kedua kiri) bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana meninjau rumah dinas eselon III Kejaksaan Tinggi Bali di Sanur, Denpasar, Senin (19/2/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

pariwisata dalam hubungannya antar masyarakat lokal maupun internasional.

“Pemkab Badung selama ini selalu mendapatkan pendampingan hukum Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara yang memiliki kuasa khusus bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, atas nama negara, pemerin-

tah, ataupun kepentingan umum,” tambah Bupati Giri Prasta.

Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas PUPR Badung, pembangunan rumah dinas eselon III Kejaksaan Tinggi Bali itu direalisasikan dengan menggunakan dana anggaran perubahan APBD Kabupaten Badung tahun 2023 senilai Rp9,7 miliar. (adv)

# Pemkab Badung Gali Ilmu Jalin Komunikasi Dengan Media Dari Dewan Pers



Jajaran Pemkab Badung saat diskusi bersama Dewan Pers dalam rangkaian HPN 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

**PEMERINTAH** Kabupaten (Pemkab) Badung menggali ilmu soal upaya membangun komunikasi dengan media dari Dewan Pers sehubungan peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta, Selasa.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Cokorda Raka Darmawan di hadapan Anggota Dewan Pers

Totok Suryanto mengungkapkan kondisi saat ini, di mana media massa semakin banyak dan pemerintah daerah ingin menjalin komunikasi yang luas.

“Awal tahun ini kami sudah melakukan kerja sama dengan teman-teman media, komunikasi kami dengan media ini untuk memperluas jangkauan informasi

pemerintah daerah, tapi bagaimana cara kita menyeleksi banyaknya media saat ini,” kata dia.

Selain itu, di balik keinginan Pemkab Badung menjangkau beragam media, ada kekhawatiran baru terkait dampak artificial intelligence (AI) yang selama ini berusaha diasasi dengan merekam setiap kegiatan atau komunikasi pemerintah daerah dengan media.

Dari pertemuan bersama Dewan Pers di Putri Duyung Resort, Ancol, itu, Pemkab Badung berharap mendapat ilmu baru untuk memperkuat hubungan mereka dengan media baik media massa, elektronik, maupun cetak.

Menanggapi pertanyaan Darmawan, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto menyampaikan arahnya untuk merangkul seluruh media, namun turut melihat kekhasan masing-masing agar tidak terjebak pada media yang

tidak profesional.

“Media semakin banyak tidak perlu takut, saran saya kepada pemkab cek mereka, produknya bagus atau tidak. Kalau media banyak tetapi hanya menjadi perpanjangan dari sebuah rilis itu tidak baik di dua sisi, kalau media hanya menyalin yang disampaikan oleh humas, maka perkuat saja media humasnya,” ujarnya.

Totok menyarankan Pemkab Badung merawat kemitraan dengan media melalui rutin mengadakan lomba-lomba, menurutnya setiap media saat ini memiliki keunikan masing-masing yang baik untuk digali.

Dari pandangannya, pemerintah juga saat ini tidak hanya membutuhkan berita bernuansa positif, namun perlu naluri kritis dari media yang ikut membangun pemerintahan tersebut melalui berita yang disajikan. (adv)

# Sekda Adi Arnawa Buka Pelatihan Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra

**SEKRETARIS** Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa membuka Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Pertemuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, Senin (12/2).

Sekda Badung Adi Arnawa mengatakan, pelatihan ini menjadi momentum yang sangat tepat karena tahun ini merupakan tahun politik, serta pada bulan November akan dilaksanakan Pilkada serentak, sehingga setiap calon kepala daerah yang nanti terpilih tentu membuat visi misi yang akan tertuang di dalam RPJMD dalam masa kepemimpinan 5 tahun ke depan.

“Melalui pelatihan ini kami harapkan peserta selaku perangkat daerah harus memahami visi-misi seorang calon kepala daerah yang terpilih nanti. Di sini selaku perangkat daerah harus dapat menerjemahkan visi-misi dari setiap calon kepala daerah karena ini menyangkut terjemahan mimpi

dari seorang kepala daerah untuk memenuhi janji kepada masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, Adi Arnawa meminta kepada seluruh peserta pelatihan agar mengikuti dan memperhatikan dengan baik materi yang diberikan oleh narasumber, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mampu menerjemahkan visi misi pemimpin Badung ke depan.

Kepala BKPSDM Badung I Gede Wijaya selaku Ketua Panitia menjelaskan, pelatihan penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN Badung dalam menyusun RPJPD, RPJMD dan Renstra, dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Peserta pelatihan yaitu ASN yang membidangi perencanaan sebanyak 95 orang. Dibagi menjadi dua kelas, kelas A dilaksanakan selama 4 hari dengan jumlah peserta 50 orang. Dilanjutkan dengan study tiru ke Provinsi Jawa Tengah. Kelas B juga dilaksanakan selama 4 hari, sebanyak 45 peserta dan study tiru ke Pemerintah Kota Semarang. Tenaga pengajar, fasilitator dari Badan Pengembangan SDM Kemendagri. (adv)



Sekda Adi Arnawa Buka Pelatihan Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra, di Badung, Senin (12/2). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung



Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa menerima audiensi dari Kwardcab Badung di Ruang Tamu Wakil Bupati Puspem Badung, Selasa (13/02). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

**WAKIL** Bupati Badung Ketut Suiasa menerima audiensi dari Kwardcab Badung terkait laporan dan kegiatan kepramukaan tahun 2023 dan 2024 di Ruang Tamu Wakil Bupati Puspem Badung, Selasa (13/02).

Turut mendampingi Wabup Suiasa, Kadisdikpora Kabupaten

Badung I Gusti Made Dwipayana, Kabid Kepemudaan dan Olahraga I Gede Suarjaya dan JF pada seksi Kepemudaan Dewa Made Muartha.

Audiensi ini juga dihadiri Sekretaris Kwardcab Badung Maria Ketut Agustini, Bendahara Kwardcab Ni Nyoman Suastini

## Wabup Suiasa Terima Audiensi Kwardcab Badung

beserta pengurus lainnya.

Pada kesempatan tersebut Wabup Suiasa menyampaikan ucapan terima kasih atas aktivitas dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Kwardcab Badung dan memberikan apresiasi terkait rencana kegiatan Pramuka Garuda yang akan dilakukan oleh Kwardcab Badung pada tanggal 22 Februari mendatang bertepatan dengan peringatan Hari Baden Powell (Hari Bapak Pandu Dunia).

“Mengingat sangat berperan pentingnya kegiatan ini bagi anak muda untuk menekuni prestasinya terkhusus di bidang

kepramukaan, maka pelantikan Pramuka Garuda ini sangat baik untuk dijalankan. Kita harus bisa memulai dan mengawasi serta meningkatkan prestasi dari anak muda saat ini,” ujarnya.

Wabup Suiasa juga mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendukung segala bentuk kegiatan yang terdapat di Kwardcab Badung dan selalu menerima masukan serta laporan dari Kwardcab Badung terkait kendala yang dihadapi di lapangan dalam melakukan sesuatu kegiatan di Kwardcab Badung. (adv)

# Kantor Pertanahan Badung Luncurkan Layanan Elektronik Pendaftaran Tanah di Badung

**KANTOR** Pertanahan Kabupaten Badung melakukan inovasi transformasi digital dengan meluncurkan Layanan Elektronik Pendaftaran Tanah yang diimplementasikan dengan Penerbitan Sertifikat Elektronik kepada masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Kamis (15/02).

Acara tersebut ditandai dengan penekanan tombol bersama oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Kakanwil BPN Prov. Bali Andry Novijandri, Kepala pusdatin Pertanahan Lahan Pangan Berkelanjutan, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Heryanto serta diakhir kegiatan dilanjutkan peninjauan loket layanan.

Wabup Suiasa dalam sambutannya mengatakan dengan diluncurkannya Layanan Elektronik Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Badung yang

diwujudkan dalam Implementasi Penerbitan Sertifikat Elektronik akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Hemat saya dengan adanya transformasi digital ini sangat fleksibel, efektif dan efisien karena masyarakat bisa melakukan dari rumah, kantor, perjalanan untuk mengajukan pendaftaran tanah. Sedangkan di sisi BPN produktivitasnya meningkat, waktu penyelesaiannya akan bisa dipercepat termasuk juga bisa menekan biaya-biaya yang timbul serta untuk keamanan dokumen akan lebih terjamin karena sudah dalam bentuk digital,” ucap Suiasa.

Lebih dilanjut disampaikan, terkait langkah atau dukungan Pemkab terhadap Implementasi ini, pertama akan melakukan sosialisasi, kedua mensinergikan data antara BPN dengan



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat menghadiri peluncuran Layanan Elektronik Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Kamis (15/2) (ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung)

Dinas Perizinan, Bapenda dan Dinas PUPR.

“Kita harus bekerja bersama-sama, itulah komitmen kami dari Pemkab Badung,” ujarnya.

Turut dihadiri oleh Kakanwil BPN Provinsi Bali Andry Novijandri, Kepala pusdatin

ATR, Kepala Kejaksaan Negeri Badung Suseno, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Heryanto, Forkopimda Kabupaten Badung, Ombudsman kabupaten Badung, Kadis PMPTSP Made Agus Aryawan, Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta. (adv)

## Sekda Tutup Bulan Bahasa Pasraman Tumpek Landep



Sekda Adi Arnawa menutup Bulan Bahasa ditandai dengan mencabut Wayang Kayonan di Balai Banjar Panca Darma Mengwitani, Minggu (18/2). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

**SEKDA** Badung I Wayan Adi Arnawa menutup Bulan Bahasa Bali yang mengambil tema “Jana Kerthi Dharma Sadhu Nuraga”. Penutupan Bulan Bahasa Bali Pasraman Tumpek Landep Desa Adat Mengwitani tersebut ditandai dengan mencabut Wayang Kayonan.

Sekda I Wayan Adi Arnawa saat menutup Bulan Bahasa Pasraman Tumpek Landep menutup Bulan di Balai Banjar Panca Darma Mengwitani, Minggu (18/2/2024) merasa bangga dan mengapresiasi perayaan Bulan Bahasa Bali Tahun 2024 Desa Adat Mengwitani yang sudah mampu dilaksanakan dengan sangat baik.

“Kita semua sudah paham dan tahu bahwa kekuatan kita di Kabupaten Badung sangat tergantung dengan pariwisata, tidak punya sumber daya alam seperti Kab/Kota/Provinsi lain diluar Bali. Kita hanya pariwisata berlandaskan budaya bernafaskan agama Hindu seperti yang dilaksanakan sekarang dalam rangkaian Bulan Bahasa Bali ini,” ucapnya.

Menurut Sekda Adi Arnawa, Bulan Bahasa Bali sebagai ajang untuk mengajegkan tradisi dan budaya melalui lomba, seperti lomba nyurat atau nulis aksara Bali, pidato bahasa Bali, mesatua Bali dan lomba yang lainnya.

“Badung sebagai daerah Wisata menghadapi tantangan yang sangat berat serta berpotensi terjadi percampuran budaya, maka melalui bulan bahasa Bali ini bisa dijadikan kekuatan seperti yang sering dikatakan Bupati Badung, perkembangan dan modernisasi boleh maju tapi jangan sampai menggerus akar budaya kita,” ujar Adi Arnawa. (adv)

# Pemkab Badung Komitmen Majukan Sektor Pertanian

**PEMERINTAH** Kabupaten Badung, Bali berkomitmen untuk terus memajukan sektor pertanian di daerahnya selain pariwisata yang menjadi sektor utama di Badung.

“Sektor pariwisata memang menjadi unggulan sebagai sumber pendapatan asli daerah Badung. Namun, sektor pertanian juga patut mendapatkan prioritas utama. Inilah tantangan ke depan yang membutuhkan dukungan semua pihak,” ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa saat kegiatan peluncuran hasil survei penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) di Badung, Rabu.

Ia mengatakan pihaknya memiliki harapan agar kedepannya sektor pariwisata juga benar-benar dapat dinikmati oleh semua sektor lainnya, salah satunya sektor pertanian.

“Oleh karena itu, kami ingin mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang berbasis Tri Hita Karana dan dapat menumbuhkan petani milenial, serta mendorong petani dengan memberikan penguatan modal,” kata dia.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan komitmen itu juga telah diwujudkan pada tahun 2023 lalu melalui kebijakan Bupati Badung



Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri acara Launching hasil survei penghitungan NTP dan NTUP di Kabupaten Badung, Rabu (21/2), di Kuta, Badung. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

dengan memberikan penyertaan modal untuk Perumda Pasar Mangu Giri Sedana.

Menurutnya penyertaan modal tersebut digunakan membeli gabah petani Badung dan memberi insentif bagi petani berupa permodalan, pupuk, bibit dan berbagai kebutuhan lainnya.

“Dengan membeli produksi petani ini, kami berupaya dapat memotivasi petani agar bangga menjadi petani sekaligus mampu menekan alih fungsi lahan pertanian serta menekan laju inflasi,” kata dia.

Ia menambahkan berdasarkan hasil survei tahun 2023, NTP Kabupaten Badung meningkat menjadi 112,39 dan NTUP Kabupaten Badung tercatat sebesar 114,25.

Untuk itu, Sekda Adi Arnawa juga memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Pertanian Badung melalui capaian tersebut sebagai indikator dari program-program yang berjalan selama ini yang telah mengurangi beban para petani.

“Ini harus dijaga. Dan kami berikan motivasi kepada jajaran Dinas Pertanian untuk tetap terus melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk membantu petani Badung agar sejahtera,” kata dia. (adv)

## Sekda Adi Arnawa Tindak Lanjuti Permasalahan Kelangkaan LPG 3 Kg



Sekda Adi Arnawa melakukan koordinasi ke Kantor Pertamina Cabang Denpasar menindaklanjuti kondisi kelangkaan gas LPG 3 Kg di Wilayah Kabupaten Badung, di Denpasar, Kamis (22/02). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

**SEKDA** Adi Arnawa atas arahan Bupati Giri Prasta melakukan koordinasi ke Kantor Pertamina Cabang Denpasar menindaklanjuti kondisi kelangkaan gas LPG 3 Kg di Wilayah Kabupaten Badung, di Denpasar, Kamis (22/02).

Kehadiran Adi Arnawa dit-

erima oleh Hasanudin Ritonga selaku Sales Branch Manager Rayon IV Badung dan Gianyar, PT Pertamina Cabang Denpasar.

Pada saat itu Hasanudin Ritonga menjelaskan bahwa untuk wilayah Badung, Pertamina setiap harinya sudah memberikan realisasi penyaluran tabung

gas 3 kg sebanyak 28.000 biji.

Untuk menyikapi kondisi kelangkaan gas 3 kg di masyarakat, dirinya menyebut sudah mengambil langkah-langkah dengan melakukan penambahan jumlah distribusi yang dimulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari kemarin dengan total 26.000 tabung gas.

“Masing-masing hari sekitar 13.000 tabung gas. Dan tentu karena penambahan ini baru saja dilakukan, hari ini atau besok pihak Pertamina akan mengevaluasi sejauh mana dampak dari pada penambahan penyaluran tabung gas tersebut terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat,” terangnya.

Setelah mendengarkan penjelasan pihak Pertamina Sekda Adi Arnawa berharap penambahan kuota penyaluran gas 3 kg untuk Kabupaten Badung, bisa secepatnya dapat didistribusikan ke masyarakat

sehingga permasalahan yang ada di masyarakat saat ini dapat diatasi secara maksimal.

“Kami selaku pemerintah dan pihak Pertamina menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik, karena bagaimanapun juga Pertamina sudah mengambil Langkah cepat, serta jika dengan penambahan yang sudah dilakukan masih tetap terjadi kelangkaan di masyarakat, kita juga mendorong untuk dilakukan penambahan lagi sehingga dipastikan kebutuhan gas LPG 3 Kg bersubsidi Kabupaten Badung dapat terpenuhi,” ujarnya.

Disisi lain Adi Arnawa mengakui kelangkaan gas 3 kg saat ini mengakibatkan kondisi masyarakat Badung menjadi cukup berat, karena menjelang hari raya kebutuhan gas LPG cukup besar, di samping itu Badung juga merupakan daerah wisata. (adv)

# Wabup Suiasa Tegas Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja

**WAKIL** Bupati Badung, I Ketut Suiasa, bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, I Putu Eka Merthawan, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada tenaga kerja di wilayah tersebut.

Hal ini diungkapkan dalam wawancara kandidat Paritrana Award Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2024 Provinsi Bali, yang berlangsung di Four Star by Trans Hotel, Renon Denpasar.

Menurut Wabup Suiasa, perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Badung.

“Konsistensi terhadap komitmen ini sangat penting untuk memperluas cakupan perlindungan bagi tenaga kerja, baik yang bekerja pada sektor penerima upah maupun tidak,” ujarnya.

Dalam upaya memperluas jangkauan perlindungan, Wabup Suiasa menyebutkan bahwa saat ini baru 74% pekerja penerima upah yang tercakup dalam program perlindungan. Untuk meningkatkan angka tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung berencana melakukan langkah-langkah strategis.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa tenaga kerja di Badung merasa aman dan terlindungi,” tambahnya.

Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah melibatkan peran aktif dari pengusaha. Wabup Suiasa menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan membiarkan pengusaha mengabaikan kewajiban mereka terhadap perlindungan tenaga kerja.

“Kami tidak ingin memanjakan pengusaha. Mereka juga memiliki kewajiban konvensional yang harus dipenuhi,” katanya.

Sebagai bentuk penegakan komitmen, Pemerintah Kabu-



Wabup Suiasa saat Wawancara Kandidat Paritrana Award Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2024 Provinsi Bali di Denpasar, Senin (19/2). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

paten Badung akan membuat kesepakatan bersama (MoU) dengan pengusaha untuk selalu memprioritaskan perlindungan tenaga kerja.

Pengusaha yang mematuhi kewajiban ini akan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindun-

gan tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Badung akan menggalakkan program kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tenaga kerja.

Program ini dianggap sangat positif dan sesuai dengan perintah undang-undang untuk memberikan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara. (adv)



Sekda Badung Adi Arnawa mengunjungi pelaksanaan GPM (Gerakan Pasar Murah) yang dilaksanakan di Badung, Senin (19/2). ANTARA/HO-Pemkab Badung

**SEKRETARIS** Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa mengunjungi pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) di Gor Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Senin (19/2).

Kunjungan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, I Wayan Wijana, Camat Kuta Utara Putu Eka Permana, serta unsur tripika kecamatan.

Dalam kesempatan tersebut,

Sekda Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, menjelaskan bahwa GPM merupakan langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

Tujuannya adalah untuk memberikan akses pasar dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat,

## Sekda Adi Arnawa Kunjungi Gerakan Pasar Murah

terutama menjelang hari raya.

Langkah ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di Kabupaten Badung.

“Dengan adanya kegiatan Gerakan Pasar Murah ini, masyarakat lebih bisa membeli produk pangan dengan harga yang mampu bersaing dan tentunya dapat mengendalikan inflasi yang ada di Kabupaten Badung,” ujar Adi Arnawa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, I Wayan Wijana, menjelaskan bahwa GPM juga bertujuan untuk memberikan akses pasar yang lebih murah bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Hal ini diharapkan dapat

memberikan manfaat ganda, baik bagi masyarakat maupun para petani lokal.

“Kegiatan ini juga merupakan peran pemerintah untuk mendorong UMKM lokal khususnya yang menjual pangan, yang akan dijual ke semua kalangan masyarakat. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para petani lokal juga dapat merasakan keuntungan, selain manfaatnya dalam membantu masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Badung melalui GPM, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan akses terhadap pangan yang berkualitas bisa lebih mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. (adv)

# Sinergi untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak, Wabup Suiasa Buka Forum Nasional 2024

**WAKIL** Bupati Badung I Ketut Suiasa bersama Kepala Kantor Wilayah Pajak Bali, memimpin pembukaan Forum Nasional Tahun 2024 di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung.

Acara ini ditandai dengan pemukulan gong dan dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktur Penegakan Hukum, Direktur Kepatuhan Internal, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ketut Suiasa menyatakan kebanggaannya karena Badung dipercaya menjadi tuan rumah Forum Nasional.

Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam konsolidasi sumber daya manusia (SDM) dan pengamanan penerimaan pajak tahun 2024.

"Pajak daerah menjadi tulang

punggung pendapatan asli daerah Kabupaten Badung dengan kontribusi mencapai 85% sampai dengan 90%. Ke depannya, penerimaan pajak ini akan terus dioptimalkan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak. Kami berharap sinergitas antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pemerintahan Kabupaten Badung semakin kuat," ungkapnya.

Suiasa juga mengharapkan hasil dari Forum Nasional ini dapat memberikan dampak positif pada Pemerintah Kabupaten Badung, mengingat daerah ini memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kemandirian ini tercermin dari sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah," tambahnya.

Forum Nasional ini diharapkan dapat menjadi wahana



Wabup Suiasa (kiri) mendampingi Kepala Kantor Wilayah Pajak Bali membuka acara Forum Nasional Tahun 2024 yang ditandai dengan pemukulan gong, di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung, Rabu (21/2). ANTARA/HO-Pemkab Badung

produktif untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pajak, serta untuk memperkuat kerja sama

antara sektor pajak dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak demi pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Badung. (adv)

# Bupati Tabanan: Cap Go Meh Semangat Baru Keanekaragaman Budaya



Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama warga etnis Tionghoa dan masyarakat di Tabanan, Bali, Minggu (18/2/2024) berjalan saat Parade Nusantara Festival rangkaian perayaan Cap Go Meh. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Tabanan)

**BUPATI** Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyebutkan perayaan Cap Go Meh Tahun 2575 di Kabupaten Tabanan, Bali, Minggu yang dikemas dengan balutan Parade Nusantara Festival merupakan spirit baru keanekaragaman di daerah itu.

Gede Sanjaya mengatakan perayaan Tahun Baru Imlek

tahun ini diharapkan mampu menjadi tonggak sejarah keanekaragaman budaya dan keagamaan masyarakat yang bisa memperkuat dan memperkaya kehidupan bersama dalam membangun Tabanan.

Spirit baru dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika menjadi representasi Pemerintah Daerah

yang menempatkan semua nilai budaya dari berbagai etnis selaras dengan kehidupan sosial masyarakat.

"Kita bisa lihat pada hari ini, semua saudara kita Tionghoa terlihat tersenyum dan tertawa gembira bisa merayakan hari raya dengan penuh suka cita. Jika nantinya ada perayaan budaya dari etnis maupun komunitas lainnya, kami tentunya akan sangat terbuka," katanya.

Bagi Sanjaya, spirit yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan pada era sekarang adalah spirit penghargaan terhadap keberagaman, dimana perbedaan yang dimiliki adalah sebuah berkah dan sebuah keniscayaan.

Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat selalu membangun kesadaran kemanusiaan dan meninggalkan pikiran-pikiran sempit berbasis etnis, suku dan agama, selagi lahir dan hidup di tanah Tabanan.

"Jadikan kota Tabanan adalah rumah besar kita, bangun rumah ini dengan pondasi kebersamaan dan spirit jele melah, nyame gelah. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung, di manapun kita, harus kita bersatu padu membangun Tabanan yang kita cintai," ujarnya.

Sanjaya berharap acara yang digelar saat ini dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

"Kegiatan seperti ini ke depannya agar bisa menjadi ikon sekaligus menjadi wadah berkreasi bagi semua komponen masyarakat, khususnya di Tabanan," katanya.

Sementara itu, Ketua Indonesia Tionghoa (INTI) PC Tabanan Ferijanto Chonie menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan kegiatan parade budaya di Kota Tabanan. (ant)

# Bupati Buleleng Upayakan Harga Beras Turun

**PENJABAT** Bupati Buleleng, Bali, Ketut Lihadnyana terus mengupayakan harga beras turun di daerah itu dengan melakukan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu.

“Bobotnya terhadap perhungan inflasi besar sehingga ada kenaikan harga sedikit saja, itu akan mempengaruhi inflasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengendalikan harga beras,” ujar Lihadnyana saat prosesi Penyaluran Cadangan Pangan Murah (CPP) Kabupaten Buleleng di Kantor Pos Singaraja, Sabtu.

Ia menjelaskan, dirinya telah melakukan kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memasok sekitar lima ton beras setiap minggunya kepada masyarakat.

Hal tersebut dilakukan untuk terus bisa mengendalikan harga. Saat ini, harga beras di pasaran mencapai Rp16.000 untuk kualitas medium dan hingga Rp17.000 untuk kualitas lebih tinggi.

Terkait itu, Lihadnyana menyatakan telah memberikan instruksi kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar untuk menurunkan harga beras hingga sampai Rp14.000 atau hingga Rp13.000 dengan harga beras yang terkendali, daya beli masyarakat akan terjaga.

“Saya perintahkan untuk mengendalikan harga. Jangan memberatkan masyarakat dari kenaikan harga beras itu. Apalagi kita mengantisipasi Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Idul Fitri. Pemerintah daerah juga harus terus mengantisipasi ha-hal semacam



Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana. ANTARA/HO-Humas Pemkab Buleleng

itu. Intinya harga jangan sampai memberatkan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Lihadnyana juga menyampaikan salah satu strategi teknis yang dilakukan untuk mengendalikan harga beras adalah membuat gerai-gerai di pasar di tempat pedagang.

Harapan selanjutnya adalah jika di pedagang harga tinggi, masyarakat bisa lari ke gerai pemerintah yang menjual harga beras dengan lebih rendah.

Upaya itu diharapkan akan mempengaruhi perkembangan harga di pasaran.

Terkait dengan hasil panen yang menurun, pihaknya memperkirakan hasil beras dari petani lokal sudah diserap oleh Perusahaan Daerah (PD) Swatantra.

Selain itu, juga dilakukan kerja sama dengan daerah lain untuk saling mengisi ketika ada kekurangan atau surplus pasokan beras. **(ant)**

# Kabupaten Jembrana Jadi Nominator Penerima Paritrana Award 2024



Bupati Jembrana I Nengah Tamba (baju biru) mengikuti penilaian nominator penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Paritrana Award 2024 di Denpasar, Bali, Senin (19/2/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Jembrana

**KABUPATEN** Jembrana, Bali, masuk dalam nominator penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Paritrana Award 2024.

“Terkait regulasi, kami telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) Jembrana tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan dan non-ASN Kabupaten

Jembrana,” kata Bupati Jembrana I Nengah Tamba di Jembrana, Senin.

Dia mengatakan perbup itu sebagai dasar hukum dan acuan bagi pemerintah daerah (pemda) dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan ketenagakerjaan.

Selain itu, kata dia, peraturan tersebut juga sebagai instrumen

penertiban pemberian izin usaha dimana pemohon/pengusaha harus melampirkan kepesertaan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Kepesertaan karyawan itu dibuktikan dengan fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan serta pembayaran iuran terakhir,” katanya.

Selain karyawan swasta, menurut dia, Pemkab Jembrana juga sudah memasukkan 3.647 pegawai non-PNS dari berbagai instansi mulai dari dinas/badan, guru, penyelenggara pemilu, perangkat desa, hingga pegawai kecamatan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Seluruh pegawai non-PNS di Pemkab Jembrana sudah masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai APBD. Dengan jaminan asuransi tenaga kerja itu, kami berharap pegawai Pemkab Jembrana lebih nyaman dan semangat dalam menjalan-

kan tugas,” katanya.

Dengan sharing dana APBD dan APBN, pihaknya membuat program terobosan perlindungan bagi pekerja rentan dengan 100 orang di setiap desa.

Menurut dia, saat ada 2.050 pekerja rentan seperti petani dan nelayan yang masuk program jaminan asuransi kecelakaan kerja dan kematian.

“Ini adalah wujud kepedulian kami untuk memberikan rasa nyaman, sekaligus jaminan perlindungan kepada pekerja rentan di Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan pekerjaannya,” kata I Nengah Tamba.

Paritrana Award merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha, yang telah mendukung penuh pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. **(ant)**

# Bulog Bali Alokasi CBP Di Pasar Murah Pemda Sambut Galungan

**BULOG** Bali mengalokasikan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam pasar murah yang di-gendakan pemerintah daerah di Pulau Dewata menjelang Hari Raya Galungan, 27-29 Februari, dan Hari Raya Kuningan pada 9 Maret 2024.

"Pemerintah daerah sudah banyak yang mengajukan (CBP) untuk pasar murah," kata Pimpinan Bulog Bali Sony Supriyadi di Denpasar, Jumat.

Pasar murah diadakan sebagai salah satu instrumen untuk menekan potensi inflasi komoditas beras karena hari besar keagamaan di Bali. Saat ini, lata dia, stok beras di enam gudang Bulog di Bali mencapai sekitar 2.800 ton dan hingga akhir Februari 2024 kembali dipasok beras hingga stoknya menjadi sekitar 11 ribu ton.

Ia menyebutkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota mulai mengajukan pasokan CBP dengan kategori beras medium

untuk digelontorkan di pasar murah dengan besaran bervariasi misalnya sebanyak dua ton.

"Pemerintah daerah yang membuat jadwal berapa kali (pasar murah) sampai akhir bulan. Saya diminta untuk menyiapkan komoditasnya dan kami layani," imbuhnya.

Selain beras medium CBP, pihaknya juga menerima penjualan pasar murah untuk beras premium atau beras komersial. Sony menjelaskan harga jual beras dalam pasar murah itu diperkirakan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) beras di Bali.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 7 tahun 2023 harga eceran tertinggi (HET) untuk beras di wilayah Bali mencapai Rp10.900 per kilogram untuk beras medium dan Rp13.900 per kilogram untuk beras premium.

Beberapa hari terakhir harga



Pekerja membawa beras bantuan untuk disimpan di Gudang Bulog Sempidi, Badung, Bali, Jumat (2/2/2024). Bulog Bali menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 1.912 ton per bulan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) hingga Maret 2024. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/tom.

beras mengalami kenaikan. Sony memperkirakan kenaikan harga beras itu salah satunya disebabkan dihentikan sementara distribusi bantuan beras pangan kepada penerima manfaat. Penghentian sementara penyaluran beras pangan selama 8-14 Februari itu untuk mendukung kelancaran Pemilu 2024.

Padahal, lanjut dia, bantuan beras pangan juga menjadi salah

satu instrumen pengendali kenaikan harga beras. Penyaluran bantuan beras kepada penerima manfaat di Bali sudah dilaksanakan kembali pada Kamis (15/2).

Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bali, jadwal sementara pasar murah jelang Hari Raya Galungan diadakan di Desa Nyalean, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, pada 20 Februari. (ant)



**PEMERINTAH  
KABUPATEN BADUNG**

*Mengucapkan*



**Selamat Hari Raya  
Galungan & Kuningan**

Mari jadikan momentum Galungan dan Kuningan sebagai hari untuk mengarahkan bersatunya rohani supaya kita semua mendapatkan pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran/byapaning idep.